



LAPORAN TAHUNAN TA. 2020

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan, hidayah dan karunia-Nya Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan disusun berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 yang merupakan uraian pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta masalah atau kendala yang muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan dan solusinya.

Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan masih jauh dari sempurna, namun kami berharap ada manfaatnya dan dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan ini.

Banjarbaru, Pebruari 2021
Kepala Dinas,

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM.....	1
B. GAMBAR UMUM SKPD.....	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2. Struktur Organisasi.....	4
2.1. Keadaan Pegawai.....	5
BAB II : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD	11
A. TUJUAN DAN SASARAN	11
1. Tujuan.....	11
2. Sasaran	12
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	12
1. Strategi.....	12
2. Arah Kebijakan	13
C. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
BAB III : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAH DAERAH.....	23
A. URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	
RUANG	23
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	23
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	28
BAB IV: TUGAS PEMBANTUAN	34
BAB V: PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	35
A. JENIS PELAYANAN DASAR	35
B. ALOKASI ANGGARAN	36

C. DUKUNGAN PERSONIL.....	36
D. PERMASALAHAN SOLUSI.....	37

BAB VI: PENUTUP 40

A. KESIMPULAN.....	40
B. SARAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari tugas tersebut dan sejalan dengan Visi Kota Banjarbaru yaitu : **TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER**", dan Misi dari Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Visi dan Misi Kota Banjarbaru tersebut perlu diikuti dengan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru.

Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 SeriD Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) ; dan
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru; dan
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru;
13. Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100/0587/Pem-setda tanggal 21 Desember 2020 tentang Laporan Tahunan SKPD TA.2020.

B. GAMBARAN UMUM SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri daerah:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung;
 2. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
- g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Peralatan dan Uji Mutu.

2.1. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarbaru sebanyak 75 orang, terdiri dari 44 orang laki-laki dan 31 orang perempuan. Berdasarkan golongan ruang, PNS DPUPR sebanyak 45 orang yang terdiri dari 11 orang Golongan IV, 28 orang Golongan III, 5 orang Golongan II dan 1 orang Golongan I (Tabel 1). Sedangkan jumlah Pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 44 orang laki-laki dan 31 orang perempuan. ASN dengan latar belakang Pendidikan S-2 sebanyak 15 orang dan S-1 sebanyak 36 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 8 orang, SLTA dan SD sebanyak 17 orang (Tabel 2).

Tabel. 1

**DATA PNS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
TAHUN 2020**

No.	Golongan Ruang	Jumlah Orang	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Golongan IV	11 orang	7 orang	4 orang
2	Golongan III	28 orang	19 orang	9 orang
3	Golongan II	5 orang	3 orang	2 orang
4	Golongan I	1 orang	1 orang	-
Jumlah		45 orang	30 orang	15 orang

Tabel. 2

**DATA PEGAWAI ASN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Sarjana Strata 2 (S-2)	15 orang	8 orang	7 orang
2	Sarjana Strata 1 (S-1)	36 orang	21 orang	15 orang
3	Diploma IV	1 orang	1 orang	-
4	Diploma III	8 orang	4 orang	4 orang
5	SLTA	16 orang	9 orang	5 orang
6	SD	1 orang	1 orang	-
Jumlah		75 orang	44 orang	31 orang

Keadaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut yang memuat Nama dan Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru keseluruhan berdasarkan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Usia.

Tabel 3.
NAMA PEGAWAI (PNS, PTT, DAN TENAGA KONTRAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2020

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. Jaya Kreshna 19631105 199302 1 002	Kepala Dinas	S1	Pembina Utama Muda	IV/c	57
2	Tri Wijayanti, S.Hut, MT 19690523 199703 1 002	Sekretaris	S2	Pembina Tk.I	IV/b	51
3	Abdussamad, ST, MT 19730927 199811 1 001	Kabid Cipta Karya	S2	Pembina	IV/a	47
4	Eka Yuliesda A, ST,MT 19730727 199803 2 008	Kabid Bina Marga	S2	Pembina	IV/a	47
5	Subrianto, ST, MT 19710731 199303 1003	Kabid Sumber Daya Air	S2	Pembina	IV/a	49
6	Akhmad Syahidan, S.Pi, M.Ec.Dev 19721031 199703 1 003	Kabid Tata Ruang	S2	Pembina	IV/a	48
7	Sumaryono, ST, MT 19680726 199603 1 004	Kabid Pengembangan Konstruksi	S2	Pembina	IV/a	52
8	Rahmat Juliani, ST 19750701 200604 1 018	Kasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan	S1	Penata Tk.I	III/d	45
9	Nina Aprodita, ST, MT 19780410 200701 2 014	Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	S2	Penata Tk.I	III/d	42
10	Rusna Apriani, ST 19770419 200701 2 009	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	S1	Penata Tk. I	III/d	43
11	M. Adi Maulana, ST, MT 19831125 200604 1 005	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	S2	Penata Tk. I	III/d	37
12	A. Rizani, ST 19720527 200604 1 013	Kasi Pengembangan Pras. Irigasi, Danau & Rawa	S1	Penata Tk.I	III/d	48
13	Pieta Widhiasari, ST, MT 19811022 200604 2 012	Kasi Pengembangan Pras. Sungai dan Waduk	S2	Pembina	IV/a	39

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
14	Poppy Syofia Yunidar Marthiana, ST, MT 19820603 200604 2 030	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang	S2	Penata Tk. I	III/d	38
15	M. Aulia Rizhan, ST 19771025 200701 1 009	Kasi Pemanf., Pengend. Dan Evaluasi Tata Ruang	S1	Penata Tk. I	III/d	43
16	Ir. Yuliansyah, MT 19650719 199703 1 006	Kasi Peralatan & Uji Mutu	S2	Pembina	IV/a	55
17	Fathurrahmani, ST 19710929 200604 1 006	Kasi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	S1	Penata Tk. I	III/d	49
18	Erny Sukmawati, ST, MM 19760123 200003 2 004	Kasubbag Keuangan	S2	Pembina	IV/a	44
19	Alip, S.Sos 19670622 199803 1 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	Penata Tk. I	III/d	53
20	Henny Rachmaniar, ST 19770917 200701 2 014	Kasubbag Perencanaan	S1	Penata Tk. I	III/d	43
21	Zabidi Anshari, ST, MT 19690228 199703 1 010	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya	S2	Pembina Utama Muda	IV/c	51
22	Iwan Noviantara, ST 19781123 201001 1 001	Fungsional Penata Ruang Muda	S1	Penata	III/c	42
23	Yuni Rosyada, A.md 19800621 201001 2 013	Fungsional Pranata Komputer	D III	Penata Muda	III/a	40
24	Irpansyah, SST 19760708 199803 1 004	Pemelihara Jalan	D IV	Penata Tk. I	III/d	44
25	Irwansyah Isnaini M., ST 19801110 200904 1 002	Pengawas Bangunan dan Gedung	S1	Penata	III/c	40
26	Benny Surya Atmaja, ST, MT 19770811 201101 1 002	Pemelihara Sarana dan Prasarana	S2	Penata	III/c	43
27	Laila Hanif, A.Md 19830416 201406 2 003	Pengawas Jaringan Utilitas	DIII	Pengatur Tk. I	II/d	37
28	Akhmad Febrianto, ST 19840218 201001 1 012	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	S1	Penata	III/c	36
29	Heri Yuwandi, ST 19790831 201001 1 003	Pengawas Jalan dan Jembatan	S1	Penata	III/c	41
30	Wahyuni, ST 19770418 199803 1 006	Pemelihara Sarana dan Prasarana	S1	Penata Tk. I	III/d	43

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
31	Rachmadani 19800616 200801 1 027	Pengelola RAB Pemel. Sarana Pengairan	SLTA	Pengatur Tk. I	II/d	40
32	Nurliana Eka Purnamasari, ST 19810323 200604 2 040	Penelaah Mutu Konstruksi	S1	Penata Tk. I	III/d	39
33	Idris 19630416 198603 1 011	Pengadministrasian Umum	SLTA	Penata Muda Tk. I	III/b	57
34	Idris Machmudin 19641028 198703 1 017	Operator Alat Berat	SLTA	Penata Muda Tk. I	III/b	56
35	Supian Ilmi 19631201 200901 1 001	Operator Alat Berat	SD	Juru	I/c	57
36	Dedi Hidayat, A.Md 19851222 201101 1 009	Operator Alat Berat	DIII	Penata Muda	III/a	35
37	Mirza Cahyadi, ST 19791223 200701 1 006	Analisis Tata Ruang	S1	Penata Tk.I	III/d	41
38	Heny Henderawati, ST 19770110 200701 2 020	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	S1	Penata Muda Tk.I	III/b	43
39	Sukirman 19660727 201212 1 001	Operator Alat Berat	SLTA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	54
40	Indra Sumargo, SE 19730506 200901 1 003	Bendahara	S1	Penata	III/c	47
41	Kristina Endang.S,SE 19780622 201001 2 006	Penata Laporan Keuangan	S1	Penata	III/c	42
42	H.M. Nursolichi 19691225 199103 1 008	Pengelola Gaji	SLTA	Penata Muda Tk.I	III/b	51
43	Nindika Kusyaning.Rd, A.md 19880228 201001 2 013	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	DIII	Penata Muda	III/a	32
44	Dhermawan 19720417 200701 1 017	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Tk. I	II/d	48
45	Fitriyani 19770914 201212 2 002	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	43
46	M. Rizal, S.ST 757 057 704	Tenaga Teknis Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	43
47	Eddy Rusmadi, ST 839 058 104	Tenaga Teknis Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	37
48	Evie Noviannor, ST 849 057 704	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Pras.Irigasi, Danau & Rawa	S1	-	-	43
49	Fitria Nur Sarie, ST 824 058 104	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	38

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
50	Hendra Mianata, A.Md 848 058 104	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Pras.Irigasi, Danau & Rawa	D III	-	-	38
51	M. Taufik Amrullah, ST 101 81 08	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	39
52	Fanny Yudhadinata,ST 157 81 08	Pengelola Teknis Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	39
53	Noorlianty,ST 256 77 09	Pengelola Kegiatan Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	43
54	Linda Nuvita Rini,ST 136 84 10	Pengelola Kegiatan Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	36
55	Selamet Heru Widodo,ST 045 80 09	Pengelola Kegiatan Seksi Pemb.Usaha Jasa Konst.	S1	-	-	40
56	Risa Wisdayanti,SE 113 84 08	Pengelola Kegiatan Seksi Pemel.Peralatan&Uji Mutu	S1	-	-	36
57	Linda Ariani 050 85 08	Operator Komputer Subbag Umpeg	SLTA	-	-	35
58	Yenny Marlina,ST 053 84 08	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	36
59	Niken Amalia Pusparini,ST 083 85 09	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	35
60	Akhmad Riza Ramadhan, A.md 007 88 10	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	D-III	-	-	32
61	Tri Bahagia Ningrum 052 89 08	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	SLTA	-	-	31
62	Ramadhani Taufiqurrahman 274 84 09	Operator Alat Berat Seksi Pemel.Peralatan&Uji Mutu	SLTA	-	-	36
63	Ustien Anaina Maria, SE, MT 420 76 09	Tenaga Administrasi Seksi Perenc.&Penataan Ruang	S2	-	-	44
64	Annajah 078 87 09	Tenaga Administrasi Seksi Perenc.&Penataan Ruang	SLTA	-	-	33
65	Arizki Riandy, ST 05.93.18.01	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	27
66	Tasya Rizkita Amalinda, S.Ars 05.92.18.02	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	28

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
67	Gt.M.Fakhruriza R., A.Md 15.94.18.03	Tenaga Administrasi Subbag Keuangan	DIII	-	-	26
68	Rizqiannor 05.99.20.08	Tenaga Administrasi Subbag Umpeg	SLTA	-	-	21
69	Ana Noviana, ST 15.87.19.04	Tenaga Administrasi Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	33
70	Ahlia, Amd 05.74.20.09	Administrasi Umum Subbag Umpeg	DIII	-	-	46
71	Fauzi Alvi, S. Ars 05.93.19.05	Tenaga Teknis Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk.	S1	-	-	27
72	Rissa Saftiranti, SKM 05.88.19.06	Pengadministrasian Umum Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk.	S1	-	-	32
73	M. Naufal Firdaus 05.01.19.07	Tenaga Teknis Seksi Perenc.&Penataan Ruang	SLTA	-	-	19
74	M. Rizkian Noor, ST	Tenaga Teknis Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	S1	-	-	28
75	Diyaul Lubaba	Pembantu Administrasi Aset Subbag Umpeg	SLTA	-	-	20



BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengacu pada Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu :

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Misi II : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan

Misi III : Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai yaitu :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta akuntabilitas keuangan serta kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
- 3) Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata.
- 4) Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan.
- 5) Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian.
- 6) Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas.
- 7) Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
- 8) Meningkatkan luasan RTH Publik

2. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah Jangka Menengah (5 tahun) kedepan.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan beberapa sasaran yang relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
- 3) Terwujudnya infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata
- 4) terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan.
- 5) Meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian.
- 6) Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas.
- 7) Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.
- 8) Meningkatnya kualitas RTH Publik.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. *Bidang Sumber Daya Air*

- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air

b. *Bidang Bina Marga.*

- Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
- Mengurangi jalan-jalan kota dalam kondisi rusak dan rusak berat dan berusaha meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
- Membangun jalan baru dan membuka konektivitas jalan dalam rangka mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.



c. *Bidang Cipta Karya.*

- Meningkatkan akses air minum yang aman.
- Meningkatkan akses sanitasi yang bersih dan sehat.
- Meningkatkan jalan lingkungan perumahan dan permukiman.
- Mendukung peningkatan sarana publik dan pemerintahan yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan.

d. *Bidang Tata Ruang*

- Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.
- Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang penataan ruang.

e. *Bidang Pembinaan Konstruksi*

- Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi.
- Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah.
- Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

1. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-program pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.
6. Meningkatkan Kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.
7. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
8. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang telah terbangun.
9. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi

11. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan bewawasan lingkungan.
13. Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan.
14. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.
15. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.
16. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Renstra Tahun 2016-2021 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2020, terdiri dari :

- a. 17 (tujuh belas) Program; dan
- b. 56 (lima puluh enam) Kegiatan

Dari 17 (tujuh belas) Program dan 56 (Lima Puluh Enam) Kegiatan tersebut apabila dijelaskan lebih rinci menjadi sebagai berikut :

I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- 1.) Kegiatan Pembangunan Jalan; dan
- 2.) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK).

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- 1.) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat.

III. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
- 2.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DID);
- 3.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
- 4.) Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan;
- 5.) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan; dan
- 6.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

IV. Program Penyediaan Air Minum

- 1.) Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK);
- 2.) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
- 3.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum;

V. Program Penyediaan Sistem Air Limbah

- 1.) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;
- 2.) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK); dan
- 3.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah;

VI. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- 1.) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 2.) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK);

VII. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- 1.) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya;
- 2.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya;

VIII. Pembangunan Fasilitas Umum

- 1.) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum
- 2.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum

IX. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2.) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor;
- 3.) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 4.) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5.) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 6.) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7.) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 8.) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; dan
- 9.) Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS.

X. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1.) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
- 2.) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 3.) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- 4.) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 5.) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 6.) Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
- 7.) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- 8.) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 9.) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; dan
- 10.) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

XI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1.) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2.) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan; dan
- 3.) Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang.

XII. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- 1.) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 2.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan;
- 3.) Kegiatan Normalisasi Drainase Jalan Kota;
- 4.) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kota; dan
- 5.) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota.

XIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- 1.) Kegiatan Perencanaan dan Penataan RTH

XIV. Program Perencanaan Tata Ruang

- 1.) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang;

XV. Program Pemanfaatan Ruang

- 1.) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang; dan
- 2.) Kegiatan Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang;

XVI. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- 1.) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang;

XVII. Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

- 1.) Kegiatan Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
- 2.) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK
- 3.) Kegiatan Pengendalian dan Uji Mutu

Tabel. 4
Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020) Target	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung	Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	97,87%	Bina Marga



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020)	
					Target	
1	2	3	4	5	6	7
Konektivitas Antar Wilayah	Konektivitas Antar Wilayah					
			Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kota Yang dibangun	6.830 m	
			Pembangunan Jalan (DAK)	Pembangunan Jalan Kota Yang dibangun	2.650 m	
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik	100,00%	Pengembangan Konstruksi
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	4 unit	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	85,36%	Bina Marga
				Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan yang baik dan sedang	77,73%	Cipta Karya
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan kota dan jembatan yang dipelihara	8.299 m	Bina Marga
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Panjang jalan kota dan jembatan yang dipelihara	10 m	Bina Marga
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DID)	Panjang jalan kota dan jembatan yang dipelihara	-	Bina Marga
			Perbaikan Jalan Lingkungan	Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	5.000 m	Cipta Karya
			Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	50.000 m	Cipta Karya
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kota dan jembatan yang dipelihara	2.200 m	Bina Marga
Mewujudkan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang berkualitas dan Merata	Mewujudkan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang berkualitas dan Merata	Persentase kepala keluarga (KK) yang mendapatkan air minum yang aman	Penyediaan Air Minum	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	100,00%	Cipta Karya
			Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Sarana dan prasarana air minum terbangun	2.030 m	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Sarana dan prasarana air minum terbangun	1.416 m	
			Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	Sarana dan prasarana air minum terbangun	2.048 m	
Mewujudkan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang berkualitas dan Merata	Mewujudkan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang berkualitas dan Merata	Persentase kepala keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Penyediaan Sistem Air Limbah	Persentase kepala keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	96,93%	Cipta Karya
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Sarana dan prasarana air limbah terbangun	58 unit	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020)	
					Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Sarana dan prasarana air limbah terbangun	33 unit	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Sarana dan prasarana air limbah terbangun	13 unit	
Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk Mendukung Produksi Pertanian	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk Mendukung Produksi Pertanian	Persentase kinerja sistem irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase kinerja sistem irigasi	74,87%	Sumber Daya Air
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan irigasi	Luas daerah irigasi yang teraliri	166,52 Ha	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi	2.599 m	
Menyelesaikan Permasalahan Banjir dan Genangan	Terselaikannya Permasalahan Banjir dan Genangan	Persentase penanganan titik rawan banjir	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase penanganan titik rawan banjir	60,00%	Sumber Daya Air
			Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai dan sumber daya air lainnya yang tertangani	5.800 m	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai dan sumber daya air lainnya yang terpelihara	4.400 m	
Mewujudkan Sarana Aparatur dan Sarana Publik yang Berkualitas	Terwujudnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik yang Berkualitas	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase sarana 18 survey dalam kondisi baik	100,00%	Cipta Karya
			Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	100,00%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	100,00%	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelayanan internal	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan internal	100,00%	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat	12 bulan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020)	
					Target	
1	2	3	4	5	6	7
				kebersihan, dan bahan pembersih		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat, harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	
			Penyediaan Jasa Non PNS	Persentase tersedianya jasa non PNS	27 orang	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	Sekretariat dan Cipta Karya
			Pembangunan Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100,00%	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	4 jenis	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 jenis	
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	4 jenis	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100,00%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100,00%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 jenis	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	15 unit	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 jenis	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	2 jenis	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP SKPD	BB	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020)	
					Target	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik					
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	5 dokumen	
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen	
				Waktu penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan sah tepat waktu	1 hari	
			Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD DU&PR dengan neraca aset	100,00%	
				Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu	1 dok	
Menyelesaikan Permasalahan Banjir dan Genangan	Terselsaikannya Permasalahan Banjir dan Genangan	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase saluran drainase kota yang berfungsi dengan baik	93,06%	Bina Marga
				Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	73,95%	Cipta Karya
			Pembangunan Saluran Drainase/ GorongGorong	Panjang drainase lingkungan yang dibangun	10.974 m	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang terpelihara	2.635 m	
			Normalisasi Drainase Jalan Kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik	3.567 m	
			Pembangunan Drainase Jalan Kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik	3.303 m	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase Kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik	3.428 m	
Meningkatnya Luasan RTH Publik	Meningkatnya Kualitas RTH Publik	Persentase RTH 20urvey yang tersedia	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase jumlah lokasi RTH Publik yang dibangun	85,00%	Tata Ruang
			Perencanaan dan Penataan RTH	Jumlah lokasi RTH Publik yang dibangun	6 lokasi	
Mewujudkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten	Proses jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yang bisa diakses publik	100,00 %	Tata Ruang



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020)	
					Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang dan peta rencana tata ruang yang bisa diakses publik	1 dokumen teknis	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat di bidang Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang	Indeks kepuasan masyarakat di bidang tata ruang	Baik (82)	Tata Ruang
			Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah izin pemanfaatan ruang (IPPT) yang terselesaikan sesuai dengan SOP	100,00%	
			Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	Persentase jumlah survei yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100,00%	
Mewujudkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten	Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penurunan ketidaksesuaian/pelanggaran pemanfaatan ruang	2,00%	Tata Ruang
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Lokasi yang dievaluasi kesesuaian peruntukannya	50 lokasi	
				Persentase rapat koordinasi untuk perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang	100,00%	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat di bidang Pengembangan Konstruksi	Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan di bidang pengembangan konstruksi	Baik (82)	Pengembangan Konstruksi
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi		Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM	100,00%	
Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang		Persentase paket pekerjaan yang terawasi kualitas dan kuantitas pekerjaannya	100,00%	
			Penyusunan/ Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang	7 layanan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-5 (2020)	
					Target	
1	2	3	4	5	6	7
				ditetapkan dalam SPM PU		
			Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK	Persentase jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	100,00 %	
			Pengendalian dan Uji Mutu	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan uji mutu	30 paket pekerjaan	



BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota (ha)		45,13 Ha	
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota (m)		74.429 m	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer (m)}} \times 100 \%$	$\frac{17.963}{25.3} \times 100\%$	71%



NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (m)}} \times 100 \%$	$\frac{68.376,94}{134.381} \times 100\%$	51%
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier (m)}} \times 100 \%$	$\frac{43.185}{60.824} \times 100\%$	71%
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	Pemenuhan dokumen RISPAM Kota		Tidak Ada	
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota		Tidak Ada	
3		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota penyelenggaraan SPAM		1 Perusahaan	
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Tidak Ada	
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		Tidak Ada	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		52.081 rumah	



NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		7.280 rumah	
3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD- T		59.361 rumah	
4		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		7.280 rumah	
5		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk/Tangki Septik}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALD dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun <25 Jiwa/Ha}} \times 100 \%$	$\frac{52.081}{59.361} \times 100\%$	87,74 %
6		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang Lumpur Tinjanta telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun >25 Jiwa/Ha}} \times 100 \%$	$\frac{7.28}{59.361} \times 100\%$	12,26 %
7		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDT}} \times 100 \%$	$\frac{7.28}{59.361} \times 100\%$	12,26 %
1	Rasio Kepatuhan IMB Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota		37 buah	
2		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kota yang dipelihara/dirawat		37 buah	



NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota		1.123,434 km
2		Panjang jalan yang dibangun		0 m
3		Panjang jembatan yg dibangun		0 m
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		321.673,9 m
5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0 m
6		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		16.105 m
7		Panjang jembatan yang direhabilitasi		0 m
8		Panjang jalan yang dipelihara		1.653 m
9		Panjang jembatan yang dipelihara		28 m
1	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kota		468 orang
2		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota		468 orang
3		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kota yang aktif dengan data termutakhir		100%



NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
4	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota		100%
5		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota		100%
6		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		100%
7		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota		100%
8		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota		100%
9		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		100%
10		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota		227 Perusahaan
11		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota		183 Perusahaan
12		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		227 Perusahaan



2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Hasil dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kota (Ha)}} \times 100\%$	$\frac{26,4 \text{ Ha}}{45,13 \text{ Ha}} \times 100\%$	58,49 %
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota (m)				
2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi yang Dibangun (Ha), Ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), Dioperasikan dan Pelihara (Ha)}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota}} \times 100\%$	$\frac{1.661 \text{ Ha}}{5.700 \text{ Ha}} \times 100\%$	29,14 %
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik				
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik				
3	Pemenuhan dokumen RISPAM Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	$\frac{\text{Jumlah Komulatif Masyarakat yang Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di Dalam Sebuah Kota}}{\text{Jumlah Komulatif Masyarakat yang Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di Dalam Sebuah Kota}} \times 100\%$	$\frac{15.389 + 47.268}{\text{Jumlah Komulatif Masyarakat yang Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di Dalam Sebuah Kota}} \times 100\%$	95,40 %



NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	<i>Jumlah total Proyeksi Rumah Tangga di Seluruh Kota Tersebut</i>	65.680	
	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota penyelenggaraan SPAM				
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM				
	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain				
4	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan berupa Cubluk + Jumlah Rumah yang lumpur Tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPAL D}}{\text{Jumlah Rumah di Kota}} \times 100\%$	$\frac{52.081+7.280}{59.361} \times 100\%$	100%
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T				
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				



NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman				
5	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota	Rasio Kepatuhan IMB Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan IMB yang Sesuai Peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang Berlaku}} \times 100\%$	Data Menjadi Wewenang Dinas Perumahan dan Permukiman	
	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kota yang dipelihara/dirawat				
6	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	$\frac{\text{Panjang Jalan Kewenangan Kota Mantap}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan di wilayah Kota}} \times 100\%$	$\frac{(472,69 + 381,67) \text{ Km}}{(555,275 + 568,159) \text{ Km}} \times 100\%$	76,05 %
	Panjang jalan yang dibangun				
	Panjang jembatan yg dibangun				
	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)				
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan				
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi				



NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Panjang jembatan yang direhabilitasi				
	Panjang jalan yang dipelihara				
	Panjang jembatan yang dipelihara				
7	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kota	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis/Analisis di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{468 \text{ orang}}{908 \text{ orang}} \times 100\%$	51,54 %
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota				
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kota yang aktif dengan data termutakhir				
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota				
	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota				



NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota				
	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota				
	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota				
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota				
	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				
8		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangannya pengawasannya}} \times 100\%$	Sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada	



NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian
				<p>paragraph 4 Pengawasan oleh Bupati/Walikota pasal 133 ayat (1) huruf c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; dan ayat (2) Pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perorangan. Berdasarkan hal tersebut di atas sampai saat ini tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh usaha orang perseorangan sehingga tidak ada data kecelakaan konstruksi</p>



BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

----- Nihil -----

BAB V

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Pada Tahun 2019, mengalami perubahan regulasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan dasar untuk Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional Tahun 2019
I.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2020 ada dua Indikator dari target Nasional, yaitu:

1

Jenis Pelayanan Dasar:

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator	Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2020	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2020	Target Nasional s/d Tahun 2020
I.	1. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	91,24	95,40 %	100,00%

No	Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2020	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2020	Target Nasional s/d Tahun 2020
I.	1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,16 %	100,00 %	100,00%

B. ALOKASI ANGGARAN

Adapun rencana anggaran untuk tahun 2020 dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 11.821.331.980** ,-. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 7
Alokasi Rencana Anggaran
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Indikator		Program	Perhitungan Rencana Biaya Tahun 2020
I	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Penyediaan Air Minum	5.502.761.480,-
	2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Penyediaan Sistem Air Limbah	6.318.570.500,-

C. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 7 Orang



Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak	:	2	Orang
Dengan Posisi / Jabatan sebagai berikut			
Kepala Dinas (ess. II b)	:	1	Orang
Sekretaris (ess. III a)	:	1	Orang
Kepala Bidang (ess. III b)	:	1	Orang
Kasubag/Kasi (ess. IV a)	:	1	Orang
Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak	:	5	Orang

D. PERMASALAHAN SOLUSI

SPM Bidang Air Minum belum mencapai target karena dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru hanya 71.97% (47.268 KK) yang memperoleh akses air minum aman, atau dalam hal ini mereka adalah masyarakat yang terlayani oleh jaringan pipa PDAM. Akses air minum aman (*safely managed*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di luar rumah (*on-premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan data BPS, 23,43% (15.389 KK) dari total jumlah KK yang tersebar di 5 kecamatan dilayani oleh akses air minum berupa akses layak terbatas dan akses layak dasar.

Akses layak terbatas (*limited access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah > atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Sedangkan akses layak dasar adalah (*basic access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di



antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah < atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Total capaian SPM Bidang Air Minum sampai dengan semester II Tahun 2020 adalah sebesar 95,40%, yang artinya terdapat 4,6% jumlah KK se Kota Banjarbaru (3.023 KK) yang belum memiliki akses layak. Berdasarkan data BPS, masyarakat ini menggunakan mata air tak terlindung dan air permukaan seperti sungai, kolam, danau/waduk dan irigasi.

Adapun total prosentase jumlah KK yang harus terlayani akses air minum aman sampai tahun 2024 adalah sebesar 28,03% dari 5 kecamatan, dengan target prosentase terbesar berada di Kecamatan Cempaka sebesar 53,54%.

Target SPM Bidang Air Minum dengan akses aman 100% dan akses layak 0% merupakan target yang harus dicapai oleh Kota Banjarbaru, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pencapaian Target SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Salah satu kendala dalam pencapaian target akses air minum 100% adalah tidak semua masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum. Beberapa penyebabnya antara lain masih kurang tercemarnya air sumur dangkal yang digunakan sebagai air minum, selain itu air tanah cenderung lebih mudah didapatkan melalui sumur gali dan pada saat musim kering, tidak semua sumur gali mengalami kekeringan, sehingga jaringan PDAM hanya dijadikan opsi cadangan dalam memperoleh air minum.

Di beberapa tempat seperti di Kecamatan Cempaka, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum utama dan kegiatan sehari-hari adalah lebih kepada faktor ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya berlangganan PDAM setiap bulannya. Padahal air sumur yang digunakan cukup tercemar, dalam hal ini pada musim kering, air cukup keruh dan berbau. Sebagaimana diketahui sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) banyak terdapat di 4 kelurahan di kecamatan ini.

Oleh karenanya, agar akses air minum aman dapat tercapai 100% pada tahun 2024 mendatang, salah satu solusinya adalah melalui pencapaian akses air minum aman melalui sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur



bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga *eligibility* akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan SPM Tahun 2020, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian dua Indikator SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 terdapat satu indikator yang belum mencapai target nasional dikarenakan oleh :

- Jalur PDAM dengan sistem pembayaran berlangganan kurang diminati oleh masyarakat daerah Cempaka, karena sebagian besar penduduknya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan kawasan tersebut sebagian besar kawasan padat penduduk tetapi bukan merupakan kompleks perumahan;

Usaha meminimalkan hal diatas kiranya perlu pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat lebih lanjut mengenai penyehatan lingkungan terutama mengenai air minum yang aman, serta penganggaran kembali pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan target akan tercapai secara maksimal.

Dengan disusunnya laporan tahunan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian visi SKPD selain itu laporan tahunan ini sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diharapkan menjadi salah satu SKPD andalan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan dimasa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. SARAN

Untuk pelaksanaan Kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2020, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang perlu SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelaksanaannya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan melalui rapat koordinasi.







